

PENGUATAN LITERASI KEUANGAN UMKM MELALUI PELATIHAN PENCATATAN KEUANGAN BISNIS BERBASIS APLIKASI

Muhamamad Daud bin Mahmud¹⁾, Muhammad Ridwan²⁾, Hasbullah Hajar³⁾,
Rahyuni Rahayu⁴⁾, Muh. Sajjaj Sudirman⁵⁾, Mulkam Musir⁶⁾

Akuntansi Syariah, FEBI, IAIN Ternate

Abstrak

Kendala yang masih sering dihadapi UMKM di Indonesia adalah minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan bisnisnya. Program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah masih kurang dibarengi dengan tenaga pendamping profesional, lemahnya sosialisasi, penyuluhan dan program pemberdayaan, sehingga UMKM belum menjadi sektor unggulan. Oleh karena itu, masih diperlukan sinergi yang kuat antara para stakeholder dalam rangka meningkatkan literasi bagi UMKM dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan bisnis. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya UMKM dalam hal pencatatan keuangan bisnis sekaligus sebagai bentuk kontribusi akademis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pelatihan dengan evaluasi berkelanjutan dipilih sebagai metode dalam pengabdian ini. Pengabdian ini dilaksanakan melalui berkolaborasi bersama Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai dengan melibatkan 25 mitra UMKM. Pelatihan yang dilakukan tim PKM dapat memberikan peningkatan kemampuan mengoperasikan aplikasi lamikro bagi pelaku UMKM. Dari 25 peserta yang berpartisipasi, 15 diantaranya dapat mengoperasikan lamikro secara baik dan benar dan sisanya membutuhkan pendampingan intensif.

Kata Kunci: UMKM; Catatan Keuangan; Lamikro

Abstract

The challenge that MSMEs in Indonesia still frequently encounter is a shortage of human resources that are capable of growing their businesses. The government-promoted empowerment initiative is still lacking in professional assistants, effective outreach, counseling, and empowerment programs, and as a result, MSMEs have not developed into a dominant sector. As a result, substantial stakeholder synergy is still required to improve MSMEs' proficiency in handling and documenting financial data. As a sort of academic contribution to raising community financial literacy, this community service strives to raise the competency of MSME resources in terms of business financial records. The approach for this service was training with objective assessment. With the assistance of 25 MSME partners, this service was provided in cooperation with Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai. The team can train MSME actors to utilize the Lamikro application with more proficiency. 15 out of the 25 participants were able to use the lamikro properly, while the others required significant assistance.

Keywords: MSME; Financial Records; Lamikro

Correspondence author: Muhammad Daud bin Mahmud, daud@iain-ternate.ac.id, Ternate, Indonesia



This work is licensed under a CC-BY-NC

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) adalah tulang punggung sebagian besar negara di seluruh dunia karena UMKM memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi warga suatu negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan (Lim et al., 2021). UMKM di sebagian besar negara di dunia sudah terbukti memberikan kontribusi berkontribusi terhadap 60% hingga 70% lapangan kerja suatu negara (National Action Plans on Business and Human Rights, 2022).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah mendeklarasikan tahun 2024 sebagai tahun kebangkitan UMKM dari disrupsi akibat pandemi covid-19. Selain covid-19, disrupsi teknologi informasi juga menuntut UMKM bertransformasi menjadi UMKM digital. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menargetkan 34 juta UMKM akan terintegrasi dalam ekosistem UMKM digital pada tahun 2024 (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Digitalisasi UMKM merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM karena UMKM merupakan salah satu segmen sasaran prioritas literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Kendala yang masih sering dihadapi UMKM di Indonesia adalah minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan bisnisnya (Mahmud et al., 2023). Sumber daya manusia yang mengelola koperasi dan UMKM umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai dan memiliki pengetahuan yang minim tentang penyusunan laporan keuangan yang baik (Maseko & Manyani, 2011; Mutiarni et al., 2017; Rudiantoro & Siregar, 2012; Yusmaniarti & Ekowati, 2019). Hal inilah yang menyebabkan pelaku UMKM dan Koperasi kesulitan dalam mengakses pembiayaan terutama yang diberikan oleh lembaga perbankan (Rahmawati & Puspasari, 2017; Sarwani et al., 2019).

Literasi keuangan merupakan keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat rentan dan kurang terlayani seperti UMKM (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hasil penelitian (Rachmawati et al., 2021) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan masih relatif rendah sehingga dukungan regulator diperlukan sebagai upaya meminimalisir kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Literasi keuangan (syariah) pelaku UMKM juga dinilai masih sangat rendah, berada dibawah 20% (Trimulato et al., 2022).

Karena sifatnya yang tidak transparan secara informasi, UMKM menghadapi hambatan yang lebih besar dalam meningkatkan pendanaan eksternal daripada mitra mereka yang lebih besar. Oleh karena itu, alternatif yang sesuai harus disediakan untuk menutup kesenjangan pendanaan UMKM tersebut (Disli et al., 2022).

Kendala terkait pengelolaan keuangan yang terjadi pada UMKM dapat diselesaikan dengan pencatatan keuangan berbasis aplikasi (Latief et al., 2022; Zunaidi et al., 2023). Solusi ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan bisnisnya secara lebih terstruktur sehingga memudahkan mereka dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan target bisnis kedepannya (Br Siahaan et al., 2022; Mahmud & Anis Safitri, 2022; Rahman & Ngandoh, 2022). Selain itu, catatan akuntansi yang terdokumentasikan dengan baik juga dapat digunakan untuk pengukuran kinerja bisnis (Maseko & Manyani, 2011; Purwantini et al., 2023)

UMKM di Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan

keuangan yang baik, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana (BPS Provinsi Maluku Utara, 2017). Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dari UMKM adalah menjalin kemitraan untuk mendapatkan pembinaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jumlah unit usaha dengan skala UMKM di Kabupaten Pulau Morotai sampai tahun 2021 mencapai 2.216 unit. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku utara (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022). Meskipun demikian, pelaku UMKM di Kabupaten Pulau Morotai masih menghadapi permasalahan klasik seperti kesulitan akses permodalan, perluasan pemasaran, serta manajemen yang kurang kompeten dan profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM dan kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM yang masih perlu ditingkatkan (Ka'bah & Latief, 2021).

Program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kurang dibarengi dengan tenaga pendamping profesional, lemahnya sosialisasi, penyuluhan dan program pemberdayaan, sehingga UMKM belum menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pulau Morotai (Ka'bah and Latief, 2021).

Laporan Perokonomian Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia disebutkan bahwa masih diperlukan sinergi yang kuat antara para stakeholder dalam rangka meningkatkan literasi bagi UMKM dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan bisnis (Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2022).

Pemberdayaan UMKM melalui penguatan kompetensi sumber daya manusianya merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan misi pemerintah dalam menaikkan kelas UMKM menjadi UMKM digital. Untuk membangun ekosistem digital UMKM diperlukan sinergitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai insan akademik, perguruan tinggi perlu mengambil peran penting dalam mewujudkan sinergitas tersebut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap misi pemerintah dalam upaya mengkonsolidasikan ekosistem digital UMKM, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate mengambil peran penting dengan terlibat langsung dalam pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM ini wajib dilakukan sebagai salah satu perwujudan tridharma perguruan tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Sebagai solusi atas permasalahan yang disebutkan di atas, maka Program Studi Akuntansi Syariah menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan pelatihan pencatatan keuangan bisnis berbasis aplikasi. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya UMKM dalam hal pencatatan keuangan bisnis sekaligus sebagai bentuk kontribusi akademis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan bersama empat program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ternate dengan tema utama yakni “Digitalisasi

UMKM Kabupaten Pulau Morotai”. Masing-masing program studi memiliki target pengabdian kepada masyarakat secara terpisah tetapi terfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM Kabupaten Pulau Morotai.

Kegiatan yang ditawarkan oleh FEBI IAIN Ternate sebagaimana terdiri dari empat program utama yakni pemanfaatan teknologi finansial (*financial technology*), pemasaran digital (*digital marketing*), pencatatan keuangan bisnis menggunakan aplikasi lamikro dan pengelolaan bisnis produk halal (*halal supply chain*). Dari ke empat program tersebut, salah satu diantaranya merupakan tanggung jawab program studi Akuntansi Syariah yaitu pencatatan keuangan bisnis menggunakan aplikasi lamikro.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan tahapan pertama yaitu pemetaan masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM di Provinsi Maluku Utara. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Maluku utara pada umumnya memiliki kemiripan yakni minimnya kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh pada pengelolaan bisnis yang baik. Dari hasil pemetaan tersebut juga diketahui bahwa jumlah UMKM paling banyak di Provinsi Maluku Utara terdapat di Kabupaten Pulau Morotai (BPS Provinsi Maluku Utara, 2017).

Tahapan kedua, tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai untuk mengkonfirmasi kondisi pelaku UMKM dan menawarkan kerjasama pemberdayaan pelaku UMKM. Tahapan ketiga dilakukan setelah tawaran kerjasama disepakati kedua belah pihak. Pelatihan dilakukan selama dua hari di balai pertemuan Disperindagkop UKM Kabupaten Pulau Morotai.

Tahapan ketiga, tim melakukan sosialisasi kepada palaku UMKM tentang pentingnya pencatatan keuangan bisnis yang terstruktur bagi UMKM sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja keuangan bisnis sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis kedepannya. Pada sosialisasi tersebut tim juga mengenalkan aplikasi “lamikro” yaitu aplikasi pencatatan keuangan UMKM berbasis desktop dan android yang telah tersertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pelaku UMKM dapat mencatat transaksi bisnis, memantau kinerja keuangan melalui luaran laporan keuangan dari aplikasi ini secara otomatis (Kementerian KUKM RI, 2020).

Tahapan keempat, tim PKM melakukan monitoring saat peserta mempraktikkan penggunaan aplikasi lamikro dan evaluasi dilakukan di sesi terakhir pelatihan. Evaluasi berkelanjutan dilakukan pascapelatihan selama 3 bulan.

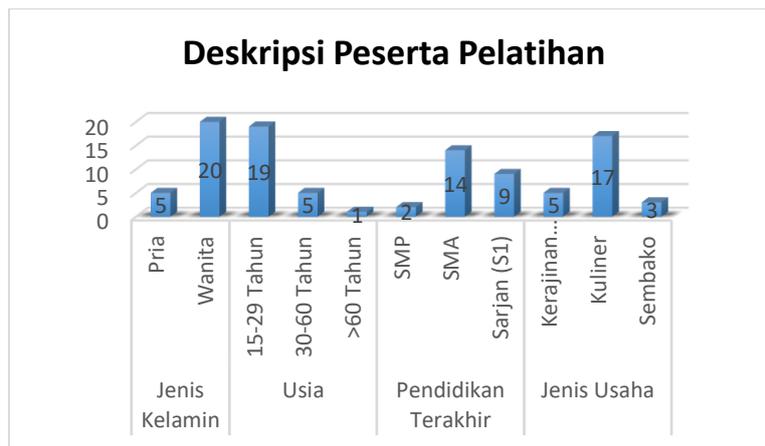


Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Pelaku UMKM yang Terlibat dalam Pelatihan

Dari hasil koordinasi dengan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai, diketahui bahwa pelaku UMKM yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan sebanyak 30 orang yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai. Peserta merupakan mitra binaan Disperindagkop UKM Kabupaten Pulau Morotai. Peserta yang tercatat mengikuti pelatihan sampai selesai dihari kedua sebanyak 25 orang yang tergambarkan dalam gambar 2 berikut.



Gambar 2. Deskripsi Peserta Pelatihan

2. Pelatihan Pencatatan Keuangan Menggunakan Lamikro

Pada hari pertama, mitra diberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan keuangan dalam berbisnis dan pengenalan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara efektif dan efisien. Praktik penggunaan aplikasi yang telah diperkenalkan tersebut dilakukan dihari kedua. Pengoperasian aplikasi lamikro dilakukan melalui beberapa tahapan:

- Pendaftaran akun email bisnis (dilewati jika peserta sudah memiliki email bisnis;
- Pendaftaran akun lamikro (peserta wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Satu NIK untuk satu pengguna (user).
- Pencatatan transaksi disesuaikan dengan klasifikasi pemasukan dan pengeluaran;
- Membaca laporan keuangan (*output*).



Gambar 3. Koordinasi dengan Disperindagkop UKM Kab. Pulau Morotai

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dihari kedua secara bersama oleh tim PKM secara langsung dengan mendampingi pelaku UMKM dalam mengoperasikan aplikasi lamikro. Diakhir pelatihan, tim melakukan evaluasi dengan melihat luaran catatan keuangan berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh lamikro melalui akun masing-masing mitra kemudian memberikan masukan berdasarkan kendala yang dihadapi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pelatihan. Dari 25 peserta pelatihan yang mendaftar akun lamikro, terdapat 15 peserta yang mengoperasikannya sampai pada tahapan adanya output laporan keuangan.

Tabel 1. Peserta yang dapat mengoperasikan aplikasi Lamikro

No	Nama Peserta	Nomor PJKC*	Ket.	Persentase Kesesuaian
1	Hj. Ethy Suwarti	PJKC 01	Cinderamata	98%
2	Mona Lanny	PJKC 05	Kuliner	87%
3	Rubianty Hamisi	PJKC 06	Cinderamata	85%
4	Sarniyanti	PJKC 07	Cinderamata	88%
5	H. La Ode Makaduni	PJKJ 08	Kuliner	89%
6	Nurafni Sangaji	PJKC 12	Kuliner	85%
7	Ibrahim F. Lumbessy	PJKC 13	Sembako	85%
8	Siti Julaiha Popala	PJKC 14	Cinderamata	87%
9	Nitha Hj. Aras	PJKC -	Kuliner	86%
10	Sri Rahayu Mas'yri	PJKC -	Kuliner	85%
11	Marwia Sibua	PJKC -	Kuliner	85%
12	Radia Sibua	PJKC -	Kuliner	90%
13	Faisal Labuha	PJKC -	Kuliner	96%
14	Siti Nafisa Kurung	PJKC -	Kuliner	90%
15	Suratni Rahaguna	PJKC -	Sembako	85%

*PJKC: Pusat Jajanan, Kuliner dan Cinderamata

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 1 di atas merupakan ringkasan dari 15 peserta yang dikategorikan dapat mengoperasikan aplikasi lamikro setelah mengikuti pelatihan. Kriteria peserta pelatihan dapat mengoperasikan lamikro dilihat dari cara menginput transaksi yang tingkat ketepatan menjurnalnya lebih dari 85%. Persentase tersebut dijadikan tolak ukur untuk mentolerir kesalahan penginputan yang dilakukan oleh peserta pelatihan. Peserta yang dapat melakukan penginputan data pada aplikasi lamikro namun hasil inputannya belum sesuai dengan standar jurnal umum atau tingkat ketepatan menjurnalnya masih di bawah 85% tidak dimasukkan dalam list pada tabel di atas. Laporan keuangan yang dihasilkan dari akun lamikro 3 peserta yang namanya dibekalkan dapat dilihat pada lampiran (lihat lampiran). Ketiga peserta tersebut dijadikan sebagai sampel karena dianggap dapat menjadi perwakilan setiap jenis bisnis yang ada pada Pusat Jajanan, Kuliner dan Cinderamata (PJKC) dan memiliki persentase kesesuaian yang tertinggi di setiap jenis bisnis yang ada.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dilakukan selama 3 bulan paskapelatihan melalui grup *whatsapp*. Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM ketika mengaplikasikan lamikro dalam pencatatan keuangan bisnisnya dapat langsung berkonsultasi melalui grup tersebut dan tim PKM akan berupaya mencari solusi kemudian mendampingi menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pertemuan secara daring.



Gambar 4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

5. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Kendala utama yang dihadapi saat pelaksanaan pelatihan ini adalah minimnya literasi digital para peserta pelatihan. Sebagian besar peserta masih kaku mengoperasikan aplikasi *handphone* maupun komputer (laptop). Pengoperasian lamikro sangat membutuhkan kecakapan pengoperasian *handphone* dan/atau komputer oleh penggunanya sehingga pelaku UMKM yang akan menggunakan aplikasi ini perlu diberdayakan melalui peningkatan kompetensi penggunaan *handphone* atau komputer.

Partisipasi aktif peserta pelatihan menjadi kendala teknis saat pelatihan dilaksanakan yang menyebabkan target keikutsertaan peserta dalam pelatihan tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang diundang adalah 30 orang tetapi yang mengikuti pelatihan sampai selesai hanya 25 orang.

SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditujukan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang masih sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Kendala yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah masalah pendanaan. Mereka sering kesulitan mendapatkan pendanaan bisnis karena minimnya kompetensi yang dimilikinya. Hal ini yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan administratif sebagaimana disyaratkan oleh pemberi dana seperti adanya pencatatan keuangan atau laporan keuangan yang terstruktur. Lamikro merupakan aplikasi yang dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan tersebut karena dapat digunakan secara cuma-cuma untuk melakukan pencatatan keuangan bisnis khususnya UMKM berdasarkan Standar Akuntansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAK-UMKM).

Pelatihan yang dilakukan oleh tim PKM dapat memberikan peningkatan kemampuan mengoperasikan lamikro bagi pelaku UMKM. Dari 25 peserta yang

berpartisipasi, 15 diantaranya dapat mengoperasikan lamikro secara baik dan benar dan sisanya membutuhkan pendampingan intensif. Pendampingan intensif ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan *handhone* dan komputer yang masih minim. PKM selanjutnya akan lebih baik jika diarahkan pada penguatan literasi digital melalui peningkatan kompetensi pengoperasian *handphone* dan komputer untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

PKM program studi akuntansi syariah mengapresiasi dan berterimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Ternate yang telah mensponsori kegiatan ini. Kami mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulau Morotai dan seluruh pelaku UMKM Kabupaten Pulau Morotai yang turut berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Maluku Utara. (2017). *Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Maluku Utara -Sensus Ekonomi 2016 (Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (ed.).* BPS Provinsi Maluku Utara.
<https://malut.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve>
- BPS Provinsi Maluku Utara. (2022). *Maluku Utara Dalam Angka 2022.*
- Br Siahaan, S. V., Debi, F., Mardi, H., & Clara, N. (2022). Peningkatan kompetensi pembuatan laporan keuangan BUM Desa menggunakan aplikasi berbasis android. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(2), 280.
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i2.14183>
- Disli, M., Aysan, A. F., & Abdelsalam, O. (2022). Favoring the small and the plenty: Islamic banking for MSMEs. *Economic Systems*, April 2021, 101051.
<https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2022.101051>
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Target Pemerintah 30 Juta UMKM Masu Ekosistem Digital pada Tahun 2024.*
<https://kemenkopukm.go.id/read/target-pemerintah-30-juta-umkm-masuk-ekosistem-digital-pada-tahun-2024>
- Ka'bah, S., & Latief, F. H. (2021). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat dalam Mendorong Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 665–674. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5302076>
- Kementerian KUKM RI. (2020). *Laporan Akuntansi Usaha Mikro.* <https://lamikro.com/>
- Latief, F., Rahman, K. G., Dirwan, D., & R., M. R. G. (2022). Peningkatan UMKM Bidang Pemasaran dan Keuangan Menyongsong Indonesia Emas 2045. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 4072–4083.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10654>
- Lim, W. M., Gupta, S., Aggarwal, A., Paul, J., & Sadhna, P. (2021). How do digital natives perceive and react toward online advertising? Implications for SMEs. <https://doi.org/10.1080/0965254X.2021.1941204>

- Mahmud, M. D. bin, & Anis Safitri, M. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Penataan Catatan Keuangan Bisnis Menggunakan Lamikro Di Kota Ternate. *Prosiding Sembadha*, 3, 21–26. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1794>
- Mahmud, M. D. bin, Yamani, S., & Usman, N. (2023). Pendampingan Penataan Catatan dan Pelaporan Keuangan Koperasi Desa Tahane. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/KUMAWULA.V6I1.38918>
- Maseko, N., & Manyani, O. (2011). Accounting Practices of SMEs in Zimbabwe: An Investigative Study of Record Keeping for Performance Measurement (A case Study of Bindura). *Journal of Accounting and Taxation*, 3(8). <https://doi.org/10.5897/JAT11.031>
- Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S. (2017). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng. *Comvice: Journal of Community Service*, 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.26533/comvice.v1i1.118>
- National Action Plans on Business and Human Rights. (2022). Small & medium-sized enterprises | National Action Plans on Business and Human Rights. National Action Plans on Business and Human Rights. <https://globalnaps.org/issue/small-medium-enterprises-smes/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 - 2025. 1–130.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Siaran Pers Nomor 82/DHMS/OJK/XI/2022: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, November, 10–12. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- Purwantini, A. H., Amalia, R. D., Kasmawati, A., Kinasih, A. S., Novitasari, N., & Sarita, R. (2023). Upaya Pengembangan Model Pemasaran Dan Pelaporan Keuangan UMKM Dusun Kadi Gunung Kabupaten Magelang. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 716–724. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jurnalpkm.v5i6.8280>
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 138. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.646>
- Rahman, K. G., & Ngandoh, A. M. (2022). Pengembangan Aplikasi Pencatatan Keuangan BUMDes pada BUMDes Semarak Bantaeng di Desa Bonto Lojong Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(3), 531–538. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.15270>
- Rahmawati, T., & Puspasari, O. R. (2017). Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.510>
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Sarwani, Nailiah, R., & Mukhtar Latif, D. (2019). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Kredit Serta Implementasi SAK ETAP. *Riset Akuntansi Keuangan*, Vol. 4(1), 11–29. <https://doi.org/10.31002/RAK.V4I1.1378>

- Tim Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara Mei 2022. In Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. www.bi.go.id
- Trimulato, T., Ismawati, I., Sapa, N. Bin, Muhlis, M., & Amani, Z. (2022). Sosialisasi Keuangan Syariah dan UMKM Halal Berbasis Masjid di Desa Ereng Ereng Kabupaten Bantaeng. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 60. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v4i2.2493>
- Yusmaniarti, Y., & Ekowati, S. (2019). Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Media Excel For Accounting (EFA). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 2(1). <https://doi.org/10.36085/jpmbr.v2i1.294>
- Zunaidi, R. A., Wahyuni, A. E., Prihardianto, R. D., Tajtibra, F., Setiawan, D. D. P., Ardianto, Y. M., NurhaLissa, R., & Widiyanto, H. (2023). Urgensi pencatatan keuangan digital berbasis ponsel pada UMKM di kota Suryabaya. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 3(2), 141–147. <https://doi.org/10.37373/BEMAS.V3I2.330>